

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Literatur review merupakan uraian tentang teori, bukti dan bahan penelitian lain yang digunakan sebagai dasar upaya penelitian untuk mengembangkan kerangka pemikiran yang ingin diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk meninjau literatur atau tulisan yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Tinjauan literatur ini dilakukan untuk melihat dampak yang terjadi terhadap Kawasan Asia Timur daripada kerjasama pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam memasang sistem THAAD di Korea Selatan. Informasi yang diterima harus relevan dan mencakup resensi, ringkasan dan pemikiran penulis dalam bentuk artikel, buku, slide, informasi dari internet, jurnal ilmiah, laporan penelitian, makalah dan berita resmi.

Review pertama, dengan penulis Matheo Manoe, Triesanto Romulo Simanjuntak, Putri Hergianasari, jurnal ilmu pengetahuan sosial, volume 9 nomor 8 membahas tentang implikasi atas kebijakan Korea Utara mengenai nuklir pada masa Kim Jong-Un terhadap stabilitas keamanan di Kawasan Asia Pasifik. Pengembangan nuklir Korea Utara tentu didasari oleh kepentingan nasionalnya. Pengembangan nuklir Korea Utara dimulai pada masa Kim Il-Sung dibuktikan oleh adanya pembangunan di Yonghyeon. Dilanjut pada pemerintahan Kim Jong-Il, bahaya serta ancaman dari senjata nuklir menjadi terus meningkat. Hal tersebut membuat Amerika Serikat menerjunkan militernya untuk membendung kekuatan militer Korea Utara. Namun, Korea Utara tetap tidak berhenti mengembangkan senjata nuklirnya. Pada tahun 2012, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-Un. Pada masa ini, Kim Jong-Un memberikan beberapa kebijakan mengenai senjata nuklir.

Kebijakan itu mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan merubah kebijakan luar negeri ataupun dalam negeri terutama hal terkait senjata nuklir. Menurut Korea Utara, dalam menjaga keamanan negaranya maka diperlukan senjata nuklir, hal ini sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kim Jong-Il. Kim Jong-Un berpendapat bahwa mustahil bagi Korea Utara untuk menyimpan pengaruhnya di kancan internasional jika tidak disertai dengan senjata nuklir.

Pada tahun 1985, Korea Utara masuk ke *Nuclear Nonproliferation Treaty* (NPT) dan Korea Utara mulai melakukan pengesahan terhadap perjanjian nuklir dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) di tahun 1992. Hal tersebut dilakukan karena Korea Utara merasa ada banyak tekanan dari dunia internasional akan pengembangan nuklir yang dilakukannya. Namun pada tahun 2003, Korea Utara melakukan pengunduran diri karena alasan kepentingan keamanan nasionalnya. Setelah mundur dari NPT, Korea Utara terus melakukan pengembangan nuklirnya dan mendapat penolakan dari dunia internasional kecuali Iran. Dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Jepang dan Korea Selatan, sehingga kedua negara tersebut mendorong untuk melakukan pemberhentian dagang serta bantuan luar negeri secara utuh ke Korea Utara.

Kebijakan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-Un digunakan sebagai upaya *deterrence*. Namun, Korea Utara terus mengembangkan nuklirnya serta dinilai telah memperkecil ukuran peralatan perangnya agar mudah dalam digunakan bersama dengan rudal. Pada masa jabatan Kim Jong-Un tercatat pada tahun 2013-2017, Korea Utara melakukan uji coba nuklir sebanyak empat kali. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kim Jong-Un tentunya berdampak pada Kawasan Asia Pasifik. *Security dilemma* terjadi di kawasan ditandai dengan adanya

kerjasama pertahanan yang dilakukan Jepang – Amerika Serikat dan Korea Selatan – Amerika Serikat. Aliansi militer tersebut justru di khawatirkan China sehingga kemungkinan besar China akan ikut mengembangkan nuklirnya untuk upaya *deterrence*. Selain itu, *security dilemma* juga ditakutkan menjadi perang *preemptif*.

Teori realisme defensif dan teori *Balance of Power* yang digunakan dalam jurnal ini. Teori realisme defensif adalah cabang dari neoliberalisme dan neoklasik liberalisme lalu berkembang dan menjadi perdebatan antara neorealis dan neoliberalis mengenai keuntungan yang akan di dapat oleh suatu negara. Menurut realisme defensif untuk mencapai kesuksesan maka diperlukan kekuasaan karena tujuan utama dari suatu negara adalah mencapai keamanan. Menurut realisme defensif, status quo suatu negara untuk melakukan kerjasama tentunya dipengaruhi oleh *security dilemma*. Teori realisme defensif digunakan untuk melihat sikap Korea Utara yang mengubah strategi *deterrence* yang dimiliki sebelumnya. Karena tanpa adanya dialog yang dikeluarkan Korea Utara pun, tentunya senjata nuklir telah menjadi salah satu cara Korea Utara untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang terlibat.

Teori *Balance of Power* yang dikemukakan oleh Waltz menjelaskan tentang pembentukan aliansi adalah bagaimana respon suatu negara terhadap bahaya ancaman yang sedang dihadapi. Menurut pandangan realistik, *Balance of Power* merupakan suatu cara yang berpusat pada kekuasaan. *Balance of Power* adalah pembagian kekuatan secara imbang serta dapat dikontrol secara adil oleh aliansi yang ingin mempertahankan *status quo*. Teori ini memandang sikap Korea Selatan yang melakukan aliansi militer dengan Amerika Serikat untuk mengimbangi

kekuatan militer Korea Utara. hal tersebut didasarkan oleh *security dilemma* yang dirasakan Korea Selatan.

Objek yang diteliti adalah kebijakan nuklir Korea Utara serta dampaknya di Kawasan Asia Pasifik. Hasil penelitian yang didapat bahwa kebijakan nuklir Korea Utara yang dinilai bersifat agresif dengan alibi sebagai upaya *deterrence* dan defensif malah menimbulkan *security dilemma* pada negara-negara di kawasan. *Security dilemma* yang terjadi, timbul karena adanya ancaman dari kebijakan nuklir yang dikeluarkan oleh Kim Jong-Un. Dengan adanya *security dilemma*, negara-negara di kawasan melakukan peningkatan kapabilitas militernya yang justru mengganggu stabilitas keamanan di kawasan. Sehingga dengan adanya kebijakan nuklir yang dikeluarkan oleh Kim Jong-Un membuat keadaan di kawasan menjadi instabilitas.

Review kedua, dengan penulis Apriyani Nur Komalasari, jurnal ilmu politik dan pemerintahan, volume 8 nomor 1 membahas tentang tanggapan apa yang diberikan aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat terhadap *Submarine Lunched Ballistic Missile* (SBLM) Korea Utara. Aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat dilatarbelakangi oleh kejadian di masa lampau yakni Perang Korea. Korea Selatan – Amerika Serikat melakukan latihan gabungan militer yang ditujukan untuk menghadapi bahaya serta ancaman yang datang dari Korea Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengimbangi kekuatan Korea Utara. Korea Utara juga bukan yang pertama kali melakukan uji coba SLBM dan menurut prediksi Amerika Serikat tidak, Korea Utara akan segera mengenalkan kapal selam baru dengan beban 3.000 ton. Senjata yang dimiliki Korea Utara saat ini gampang untuk di sembunyikan serta di pindah-pindahkan. Amerika Serikat juga mendesak Korea Utara untuk berhenti

melakukan provokasi di kawasan dan Amerika Serikat akan selalu terbuka untuk terlibat diplomatik dengan Korea Utara. Namun, hal tersebut di tolak serta menuduh Korea Selatan dan Amerika Serikat selain membicarakan diplomasi, mereka juga meningkatkan ketegangan sendiri di kawasan dengan latihan gabungan militernya.

Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu konsep keamanan nasional dan konsep *security dilemma*. Konsep keamanan nasional adalah kondisi setiap negara harus berdaulat yang artinya aman serta bebas dari ancaman internal ataupun eksternal. Dalam jurnal ini konsep keamanan nasional diperlihatkan dengan tanggapan dari aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat dalam merespon peluncuran *Submarine Launched Ballistic Missile* (SLBM). Tanggapan dari aliansi tersebut memperlihatkan bahwa adanya latihan gabungan yang ditujukan untuk mengimbangi kekuatan militer Korea Utara.

Konsep *security dilemma* secara teori adalah konsep yang berhubungan dengan psikologi suatu negara sehingga pembuatan keputusan didasarkan pada ketidakpercayaan dan ketidaktahuan kondisi serta kemampuan pihak musuh. Dalam jurnal yang ditulis oleh Apriyani Nur Komalasari, konsep *security dilemma* lebih diperlihatkan pada upaya *defensive* Korea Selatan sehingga perlu meningkatkan kegiatan keamanannya yang dibuktikan melalui aliansi militer dengan Amerika Serikat untuk menjaga keamanan nasionalnya dari rudal balistik Korea Utara. Rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara tentunya memberikan efek cemas dan kekhawatiran bagi negara di kawasan, terutama Korea Selatan yang sebelumnya telah memiliki trauma akibat Perang Korea.

Objek yang diteliti adalah peluncuran *Submarine Launched Ballistic Missile* (SLBM) Korea Utara yang berdampak pada kecemasan aliansi Korea Selatan dan

Amerika Serikat. Hasil penelitian yang didapat bahwa aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat belum berhasil dalam denuklirisasi nuklir Korea Utara dibuktikan dengan adanya penolakan dari Korea Utara atas tawaran diplomatik dari Amerika Serikat. Latihan gabungan serta tindakan agresif Amerika Serikat justru menambah ketegangan di Kawasan Asia Timur.

Review ketiga, dengan penulis Indryanti Pringgodigjo Joyo Negoro, ejournal hubungan internasional, volume 7 nomor 1 membahas tentang tujuan dari ditematkannya sistem anti rudal Amerika Serikat di Korea Selatan. Dalam aliansinya dengan Korea Selatan, Amerika mengedepankan militernya untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan nasional maupun kepentingan negara sekutunya. Dalam melindungi negara sekutunya, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pertahanan yakni penempatan pasukan serta senjata militernya di negara sekutu untuk melindungi dari ancaman. Kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk negara sekutunya adalah penempatan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Penempatan THAAD tentunya bukan hal yang pertama kali Amerika Serikat lakukan, karena sebelumnya Amerika Serikat telah menempatkan THAAD di Ceko dan Polandia. Penempatan THAAD di Korea Selatan dilakukan pada tahun 2017. Jepang memiliki dua sistem antirudal yang dibangun Amerika Serikat tahun 2006. Penempatan THAAD merupakan bagian dari kerjasama *Ballistic Missile Defense* (BMD). Tujuan kerjasama BMD adalah untuk melindungi sekutunya melalui sistem pertahanan.

Teori *regional security complex* dan konsep kerjasama keamanan yang dipakai jurnal ini. Teori *regional security complex* menurut Barry Buzan adalah teori yang difokuskan terhadap komponen kawasan serta dinamika keamanan

internasional. Dalam teori ini, Buzan berpendapat bahwa terdapat dua pola hubungan antar negara di kawasan yaitu *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Pola *amity* adalah adanya pertemanan serta persahabatan antar negara di kawasan serta berekspektasi agar terciptanya keamanan serta dorongan dari negara lain. Perwujudan dari keamanan dapat dilihat dari adanya bentuk aliansi. Perwujudan keamanan dapat dilihat dari adanya penjelasan secara politik yang mendorong kebijakan lain. Sedangkan pola *enmity* adalah pola hubungan yang dibentuk atas perasaan yang saling curiga satu sama lain dan disertai rasa takut. Ketidakpercayaan dapat dilihat dengan adanya aliansi tandingan. Sedangkan rasa takut yang dialami dapat dilihat dari adanya peningkatan kapabilitas militer dibandingkan dengan negara pesaingnya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Indryanti Pringgodigjo Joyo Negoro, pembangunan *regional security complex* di Kawasan Asia Timur membentuk pola *enmity*. Pola *enmity* di Kawasan Asia Timur terjadi karena adanya konflik di Semenanjung Korea, Korea Utara yang terus melakukan program pengembangan nuklirnya sehingga memunculkan kecemasan di kawasan, hal tersebut dijadikan sebagai gerakan politik dalam meningkatkan negosiasi terhadap dunia internasional, khususnya Amerika Serikat dan negara aliansinya di Kawasan Asia Timur.

Konsep kerjasama keamanan adalah negara-negara melakukan kerjasama karena untuk menjaga kepentingan nasional negaranya serta memastikan akan kepentingan nasionalnya. Tujuan dari kerjasama keamanan adalah melakukan pencapaian stabilitas keamanan kepada negara yang melakukan kerjasama. Konsep kerjasama keamanan lebih memfokuskan pada kemampuan pemerintah untuk

melindungi suatu negara dari bahaya atau ancaman yang terdapat dari luar maupun dari dalam. Hal ini dilakukan agar kondisi keamanan terpenuhi.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konsep kerjasama keamanan ditandai dengan adanya pembentukan aliansi militer dengan negara diluar kawasan dan adanya modernisasi pertahanan militer yang dilakukan Jepang maupun Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Dibuktikan dengan adanya kerjasama BMD serta modernisasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dalam melindungi Korea Selatan dan Jepang yaitu menempatkan THAAD dengan sistem sensor radar peringatan dan sistem pencegat rudal. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respon dari rasa takut dan curiga aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Objek yang diteliti adalah penempatan THAAD di Korea Selatan sebagai bentuk kebijakan Amerika Serikat dalam melindungi negara aliansinya dari ancaman. Hasil penelitian yang didapat adalah penempatan THAAD dikarenakan dua faktor. Pertama, karena adanya instabilitas yang terjadi di kawasan sehingga Amerika Serikat membangun pola *amity* dengan Korea Selatan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Kedua, karena adanya kepentingan Amerika Serikat dalam spionase dalam melacak informasi alustsista milik China dan Korea Utara.

Review keempat, dengan penulis M. Ganang Wira Pradana, jurnal studi diplomasi dan keamanan, volume 13 nomor 2 membahas tentang sikap China terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan. Korea Selatan menyetujui pemasangan THAAD karena adanya uji coba rudal balistik Hwasong milik Korea Utara. China merupakan salah satu negara yang keberatan karena pemasangan

THAAD di Korea Selatan. Menurut China, sistem pertahanan udara yakni radar X-band AN/APY-9 mengancam keamanan nasional China dan stabilisasi di Semenanjung Korea. Selain itu, China menganggap bahwa sistem THAAD dapat melemahkan strategi *deterrence* China. Sebelum dilakukannya penempatan THAAD di Korea Selatan, hubungan China sebagai mitra dagang Korea Selatan baik-baik saja dari dua puluh tahun terakhir. Setelah terjadinya penempatan THAAD di Korea Selatan, terjadilah krisis THAAD antara China dengan Korea Selatan. China menerapkan sanksi ekonomi tidak resmi, memboikot produk makanan, sektor pariwisata dan sektor hiburan dari Korea Selatan. Sanksi ekonomi yang diberikan China cukup berpengaruh pada sektor ekonomi Korea Selatan.

Pada sektor hiburan, penampilan bintang pop dan aktor Korea ditunda bahkan sampai dibatalkan tanpa kejelasan, saluran televisi China melarang masuknya acara televisi Korea Selatan. Pada produk Korea Selatan, seperti produk makanan, elektronik, kosmetik dan bahkan perusahaan mobil turun sekitar 52%. Pada sektor pariwisata, turis China mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat sebanyak 4.169.353 turis China yang mengunjungi Korea Selatan di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2016, kedatangan turis China sebanyak 8.067.722 wisatawan. Karena adanya penurunan turis China ke Korea Selatan, tentu berdampak pula pada pendapatan dari industri pariwisata. Penurunan terjadi sebanyak 20% terhitung dari tahun 2017 dengan total kerugian ekonomi mencapai \$6,8 juta.

Teori *foreign policy analysis* digunakan untuk menjelaskan tujuan dari kebijakan luar negeri. Poin a,b,c berhubungan dengan pembuat keputusan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan. Poin a, proses yang membuat suatu negara. Poin b, mengambil suatu keputusan. Poin c, menangani masalah tertentu.

Pada teori ini, poin a digunakan untuk melihat mengapa China. Poin b, tidak memaksa Korea Selatan untuk membongkar sistem pertahanan antirudal. Poin c, kemudian memutuskan untuk mencabut sanksi ekonomi atas sengketa THAAD.

Dari teori yang dipaparkan, terlihat secara jelas bahwa China merasa keberatan akan penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Sanksi ekonomi yang dilakukan China tentunya membuat rugi bagi Korea Selatan karna dapat dilihat bahwa tujuan ekspor Korea Selatan terbesar adalah ke China yang menghasilkan sebesar \$160 miliar. Korea Selatan berusaha meyakinkan China bahwa sistem THAAD tidak digunakan untuk hal-hal yang membahayakan atau mengganggu kedaulatan China. Dalam hal ini, China tetap ingin Korea Selatan mundur dari program THAAD. Namun, karena keberanian Korea Selatan melakukan pembicaraan bilateral dengan China dan China berpegangan pada diplomasi periferal. Maka dari itu China tidak memaksa Korea Selatan untuk mencabut sistem THAAD dan China mencabut semua boikot ke Korea Selatan. Sehingga kedua negara tetap menjalin kerjasama bilateral.

Objek yang diteliti adalah sanksi ekonomi yang diberikan China pada Korea Selatan atas penempatan sistem THAAD. Hasil penelitian yang didapat adalah China mengeluarkan kebijakan dalam bentuk boikot tidak resmi. Hal tersebut dibuat agar membuat Korea Selatan jera. China menganggap Korea Selatan lebih mendekati Amerika Serikat namun Korea Selatan sangat bergantung dengan China dalam sektor ekonomi dan pariwisatanya. Selain itu, alasan China tidak memaksa Korea Selatan untuk membongkar sistem THAAD karena China menjalankan diplomasi periferal yang dimana inti utamanya adalah ingin lebih mendekatkan diri pada negara tetangga dengan tangan terbuka dan menggunakan 4 prinsip, yakni

persahabatan, timbal balik, keikhlasan dan inklusivitas. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan potensi China dalam menjalankan projek *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Keempat literatur review telah menjelaskan bahwa dalam kerjasama *Ballistic Missile Defense* (BMD) terdapat kepentingan nasional Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur. Kerjasama BMD sempat menjadi instabilitas di kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap China yang melakukan boikot tidak resmi terhadap produk Korea Selatan yang tentunya berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata Korea Selatan. China menganggap bahwa penempatan sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) dapat mengganggu kepentingan nasional China dan China menganggap bahwa sistem THAAD yang ditempatkan di Korea Selatan dicurigai sebagai spionase sistem keamanan China. Selain itu kerjasama latihan gabungan yang dilakukan Korea Selatan – Amerika Serikat tidak cukup untuk meredakan sikap Korea Utara dari peluncuran rudal ataupun pengembangan nuklirnya. Jadi, pada literatur review kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama pertahanan yang dilakukan Korea Selatan – Amerika Serikat yakni latihan gabungan dan BMD menjadi salah satu penyebab instabilitas di Kawasan Asia Timur.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Teori	Masalah	Kesimpulan
1	Kebijakan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan	Teori yang digunakan: a. Teori Realisme Defensif	Apa implikasi dari kebijakan nuklir Korea Utara di masa Kim Jong-Un	Kebijakan nuklir Korea Utara yang dinilai bersifat agresif dengan alibi sebagai upaya <i>deterrence</i> dan

	<p>Kim Jong-Un dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Internasional</p>	<p>b. Teori balance of Power</p>	<p>terhadap stabilitas di Kawasan Asia Pasifik?</p>	<p>defensif malah menimbulkan <i>security dilemma</i> pada negara-negara di kawasan. <i>Security dilemma</i> yang terjadi, timbul karena adanya ancaman dari kebijakan nuklir yang dikeluarkan oleh Kim Jong-Un. Dengan adanya <i>security dilemma</i>, negara-negara di kawasan melakukan peningkatan kapabilitas militernya yang justru mengganggu stabilitas keamanan di kawasan. Sehingga dengan adanya kebijakan nuklir yang dikeluarkan oleh Kim Jong-Un membuat</p>
--	--	----------------------------------	---	--

				keadaan di kawasan menjadi instabilitas.
2	Aliansi Keamanan Korea Selatan – Amerika Serikat Dalam Menanggapi SLBM (<i>Submarine Lunched Ballistic Missile</i>) Korea Utara	Teori yang digunakan: a. Konsep Keamanan Nasional b. Konsep <i>Security Dilemma</i>	Seberapa efektif tanggapan dari aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat dalam peluncuran SLBM Korea Utara?	SLBM Korea Utara sangat mengganggu kecemasan di kawasan. Dalam menanggapi hal tersebut, Korea Selatan melakukan latihan gabungan dengan Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat memberikan peringatan dan melakukan diplomatik dengan Korea Utara. Namun, aliansi Korea Selatan – Amerika Serikat belum berhasil dalam denuklirisasi nuklir Korea Utara dibuktikan dengan adanya penolakan dari

				<p>Korea Utara atas tawaran diplomatik dari Amerika Serikat. Lalu, latihan gabungan serta tindakan agresif Amerika Serikat justru menambah ketegangan di Kawasan Asia Timur.</p>
3	<p>Kebijakan Penempatan Sistem Anti Rudal Amerika Serikat di Korea Selatan</p>	<p>Teori yang digunakan:</p> <p>a. Teori <i>Regional Security Complex</i></p> <p>b. Konsep Kerjasama Keamanan</p>	<p>Apa tujuan dari penempatan THAAD di Korea Selatan?</p>	<p>Penempatan THAAD di Korea Selatan merupakan bentuk dari adanya instabilitas di kawasan. Selain untuk menangkal rudal milik Korea Utaea, tujuan di tempatkannya THAAD juga sebagai upaya dari kepentingan nasional Amerika Serikat. Penempatan THAAD di Korea Selatan dikarenakan dua</p>

				<p>faktor. Pertama, karena adanya instabilitas yang terjadi di kawasan sehingga Amerika Serikat membangun pola <i>amity</i> dengan Korea Selatan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Kedua, karena adanya kepentingan Amerika Serikat dalam spionase dalam melacak informasi alustsista milik China dan Korea Utara.</p>
4	China Shifting Behaviour Towards South Korea in 2016-2017 THAAD Crisis	Teori yang digunakan adalah <i>Foreign Policy Analysis</i>	Bagaimana sikap China terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan?	China mengeluarkan kebijakan dalam bentuk boikot tidak resmi. Hal tersebut dibuat agar membuat Korea Selatan jera. China menganggap

	Resolution in Korea Peninsula			<p>Korea Selatan lebih mendekati Amerika Serikat namun Korea Selatan sangat bergantung dengan China dalam sektor ekonomi dan pariwisatanya. Selain itu, alasan China tidak memaksa Korea Selatan untuk membongkar sistem THAAD karena China menjalankan diplomasi periferal yang dimana inti utamanya adalah ingin lebih mendekatkan diri pada negara tetangga dengan tangan terbuka dan menggunakan 4 prinsip, yakni persahabatan, timbal balik, keikhlasan dan</p>
--	----------------------------------	--	--	--

				<p>inklusivitas. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan potensi China dalam menjalankan projek <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang maupun jangka pendek.</p>
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam mempermudah serta memperkuat penyusunan penelitian ini, diperlukan kerangka teoritis yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tujuan dari kerangka teoritis ini, yaitu kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan secara teoritis.

2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau yaitu suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menjaga kepentingan nasional didalam maupun diluar negeri yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kebijakan luar negeri di konsepkan oleh Rosenau kedalam 3 bentuk yang dimana satu sama lainnya saling terkait (Anak Agung Banyu Perwita, 2005).

- a. Kebijakan luar negeri dalam seperangkat orientasi adalah nilai yang penting dari kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan luar negeri sebuah negara. Hal ini merupakan hasil dari sejarah serta tanggapan dari masyarakat terhadap wilayah yang strategis negara dalam dunia politik.
- b. Kebijakan luar negeri dalam strategi adalah cara atau alat yang dinilai dapat menjawab hambatan serta tantangan yang terjadi dari lingkungan negara lain. Strategi ini, berlandaskan dari tujuan kebijakan luar negeri negaranya, sebagai hasil pemahaman elit terhadap tujuan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi tertentu yang membutuhkan suatu strategi.
- c. Kebijakan luar negeri dalam bentuk perilaku adalah hal yang paling empiris dalam sebuah kebijakan luar negeri. Karena konsep ini adalah langkah-langkah yang nantinya akan diambil oleh para pembuat keputusan dalam menanggapi sebuah kejadian dan situasi luar negerinya yang merupakan translasi dari tujuan dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk sebuah tindakan yang dilakukan ataupun pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri dalam situasi tertentu.

Rosenau juga mengelompokkan faktor-faktor kebijakan luar negeri melalui dua rangkaian, pengelompokan tersebut dibagi berdasarkan sumber-sumber tersebut yakni *time continuum* dan *systemic aggregation continuum*. Sumber-sumber yang terdapat dalam *time continuum* meliputi sumber yang bersifat tetap dan berlaku secara terus-menerus dan terdapat sumber yang dipengaruhi oleh perubahan jarak pendek, serta terdapat sumber-sumber yang dapat berubah. Terdapat sumber utama yang menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan luar negeri yaitu:

- *Systemic sources* yaitu sumber yang berasal dari lingkungan luar negeri suatu negara. Sumber ini mengenai tingkat hubungan diantara negara-negara besar, bentuk dari kerjasama yang dibentuk oleh negara-negara dan faktor situasional luar negeri yang dapat berupa isu area ataupun krisis.
- *Societal sources* yaitu sumber yang berasal dari lingkungan dalam negaranya sendiri. Sumber ini mencakup aspek sejarah dan budaya, pembangunan ekonomi, tingkat sosial dan opini publik. Sejarah dan kebudayaan disini mencakup nilai, norma, tradisi dan sejarah yang melandasi hubungan antar masyarakat. Untuk pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara dalam mencapai kesejahteraannya yang didasari oleh kepentingan negaranya untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Tingkat sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara. Opini publik juga tentu dapat menjadi sebuah faktor dimana kita dapat melihat perubahan pandangan masyarakat terhadap dunia internasional.
- *Governmental sources* adalah sumber dalam negeri yang menjelaskan mengenai pertanggung jawaban politik dan tingkatan di dalam pemerintahan. Pertanggung jawaban politik disini maksudnya bertanggung jawab dalam pemilihan umum, kompetisi partai dan merespon situasi luar negeri. Sementara tingkat kepemimpinan berasal dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat didalam pemerintah.
- *Idiosyncratic sources* adalah sumber dalam negeri yang melihat nilai-nilai dari pengalaman, bakat serta perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Hal tersebut mencakup persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari lingkungan internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

Kebijakan luar negeri menurut K.J Holsti adalah suatu tindakan atau ide yang disusun untuk memecahkan masalah atau menghasilkan perubahan di suatu lingkungan. Negara mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk memenuhi serta memperoleh kepentingan nasionalnya ataupun kolektif. Kebijakan luar negeri pada umumnya dilakukan untuk dapat mempengaruhi negara lain, menjaga keamanan nasional, prestise, serta keuntungan untuk negaranya.

Dalam melakukan kebijakan luar negerinya, setiap negara dihadirkan oleh pilihan mengenai instrumen yang akan digunakan oleh negara. Instrumen kebijakan luar negeri adalah alat dalam melaksanakan keputusan bidang politik luar negeri yang berwujud diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda, intervensi, perang dan senjata. Instrumen yang terdapat didalamnya dapat bersifat damai ataupun tidak (Sudarsono, 1987).

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, K.J Holsti membagi teori kebijakan luar negeri kedalam 5 instrumen, yaitu:

a. Instrumen Diplomasi

Diplomasi tidak dapat dipisahkan dengan politik luar negeri serta kepentingan nasional. Karena dalam praktiknya, diplomasi merupakan komunikasi yang nanti hasilnya dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah diplomasi yang dilakukan oleh seorang diplomat. Selain itu dengan adanya negoisasi, semua negara dapat mencapai kepentingan negaranya masing-masing. Karena sistem internasional yang sifatnya dinamis, maka praktik diplomasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan fenomena internasional. Maka dari itu, setiap negara wajib untuk menyiapkan strategi serta kemampuan untuk berdiplomasi dengan baik, sehingga dapat mencapai kepentingan nasionalnya.

b. Instrumen Propaganda

Propaganda adalah komunikasi yang diatur oleh perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi kelompok lain sehingga mengubah sikap daripada kelompok lain agar terpengaruh.

c. Instrumen Ekonomi

Diplomasi ekonomi sering digunakan oleh negara-negara di dunia yang tentunya untuk memperoleh suatu tujuan politik luar negerinya. Dalam diplomasi ekonomi, suatu negara tentunya harus mampu memanfaatkan dengan bijak apa saja yang nantinya menjadi kebutuhan, ketergantungan, penawaran bonus dan mengancam dengan cara menekan ekonomi suatu negara. Selain itu, diplomasi ekonomi dapat menciptakan pengaruh serta keterkaitan suatu negara melalui jalur ekonomi. Dalam diplomasi ekonomi, Hoslti membagi program bantuan kedalam 4 jenis yaitu bantuan militer, grant dan program komoditi impor, bantuan teknik dan pinjaman pembangunan.

d. Intrumen Intervensi

Intervensi adalah salah satu tindakan yang meliputi urusan internal suatu negara yang bertujuan untuk menjaga dan mengubah situasi politik yang sedang berjalan di suatu negara. Menurut Holstri, invasi militer merupakan bentuk campur tangan negara lain yang diwujudkan dengan cara mengirimkan eskpedisi militer untuk menunjang suatu pemerintahan yang sedang berkuasa.

e. Persenjataan, perang dan pengaruh politik

Penggunaan instrumen ini, suatu negara dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan politik suatu negara. Holsti memberikan tujuan kebijakan luar negeri, yaitu :

- Nilai (Value) ini adalah yang menjadi tujuan para pembuat keputusan
- Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dalam artian terdapat perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. Hal tersebut merupakan tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota dengan kurun waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Holsti, 1972).

2.2.2 Teori *Regional Security Complex*

Teori *Regional Security Complex* adalah teori yang menekankan pada unsur kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional yaitu melalui pembentukan *regional security complexes* (Buzan B. , 1991). Security complex menurut Bary Buzan adalah sebagai sekumpulan negara yang karena satu dan lain hal memiliki kedekatan, yang membuat primary security negara-negara tersebut bergabung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Definisi region/kawasan dalam regional security complex dapat dilihat dari kacamata keamanan sehingga suatu wilayah dapat di definisikan berdasarkan jangkauan pengatuhnya terhadap suatu isu keamanan. Analisis mengenai regional security complex meliputi unsurunsur seperti geografi, etnisitas dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Ketiga faktor tersebut nantinya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sistem politik yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya saling ketergantungan antar satu negara dengan negara lain yang akan menyebar serta munculnya sistem pertahanan dan keamanan regional. Menurut Bary Buzan, unsur penting dalam pembentukan *regional security complex* adalah adanya saling ketergantungan dan hubungan kerjasama keamanan antar negara-negara dalam kawasan tersebut. Meski

harus terbentuk hubungan yang saling bergantung antara satu sama lain, namun Bary Buzan tidak menyangkal adanya hubungan yang selalu diwarnai oleh 28 persaingan, perimbangan kekuasaan, adanya aliansi dan masuknya kekuatan eksternal ke dalamnya (Buzan B. , 1990).

2.3 Asumsi Penelitian

Asumsi adalah suatu gambaran, sangkaan atau perkiraan, pendapat atau kesimpulan sementara dan suatu teori sementara yang belum dapat dibuktikan. Asumsi dibutuhkan sebagai landasan berfikir peneliti dalam bentuk pernyataan yang dibentuk berdasarkan postulat. Maka asumsi yang dikemukakan oleh peneliti yaitu **adanya perubahan kebijakan luar negeri negara-negara di Kawasan Asia Timur Pasca Penempatan Sistem THAAD di Korea Selatan.**

2.4 Kerangka Analisis

